

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi saat ini tentunya memunculkan tantangan tersendiri bagi suatu Negara, khususnya di Indonesia. Tantangan tersebut muncul diberbagai sektor, salah satunya ialah pada sektor perekonomian. Pada sektor perekonomian sendiri salah satu tantangan yang dihadapi ialah munculnya kebutuhan akan instrumen dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini tentunya peran pemerintah berikut masyarakat sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan instrument tersebut, juga kestabilan perekonomian di suatu daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentang otonomi daerah, Pasal 1 nomor 5 tersebut. Dimana pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban terhadap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang dimiliki suatu daerah yang dipimpin olehnya, demi kelancaran dan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Hal tersebut tentunya juga bersangkutan pada sektor perekonomian suatu daerah, dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, disinilah peran pemerintah juga masyarakat sangat

dibutuhkan, terutama peran pemerintah dalam pengembangan potensi-potensi dan keanekaragaman yang dimiliki suatu daerah, dalam hal ini pemerintah dapat mewujudkannya melalui pengembangan ekonomi lokal.

Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang melibatkan pembentukan kelembagaan baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu. Sedangkan menurut World Bank (2001) dalam Nurzaman, 2002 Mulyana et al., 2017. adalah proses dimana para pelaku pembangunan, bekerja kolektif dengan mitra dari sektor publik, swasta dan non pemerintah, untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Berdasarkan data *Focus Economy Outlook 2020*, sektor ekonomi kreatif Indonesia diperkirakan mampu menyumbang hingga Rp1.100 triliun ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sumbangan terbesarnya berasal dari tiga subsektor industri ekonomi kreatif, yaitu kuliner, *fashion*, dan kriya (kerajinan). Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) yang dikeluarkan Badan Ekonomi Kreatif, tiga kontributor terbesar PDB ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2017 adalah *subsector fashion* sebanyak 41,4 persen, lalu kuliner 17,6 persen, dan kriya hampir 15 persen.

Dari ketiga subsektor penyumbang ekspor Indonesia teratas yang telah disebutkan di atas salah satunya ialah kriya. Kriya merupakan salah satu jenis kerajinan yang diproduksi dengan menggunakan keterampilan tangan manusia yang dimana hasil karya tersebut selalu memperhatikan dari segi estetika atau keindahan, serta aspek fungsional dari karya tersebut. Seni kriya sendiri

merupakan salah satu dari 16 subsektor industri kreatif yang ada di Indonesia. Salah satu jenis kriya yang banyak diminati ialah seni kriya batik.

Batik adalah kerajinan tangan yang dibuat dengan memberikan pola atau gambar pada sebuah kain memakai bahan pewarna tertentu sehingga menghasilkan pola sesuai dengan yang diinginkan (Prawiro, 2018). Batik Indonesia sendiri berhasil menjadi market leader pasar batik di dunia. Hal tersebut sesuai dengan ujaran dari menteri perindustrian, Badan Pusat Statistik (BPS) mendata nilai ekspor batik pada Januari-Juli 2020 mencapai US\$21,54 juta, sedangkan pada Januari-Juni 2019 angka tersebut berada di posisi US\$17,99 juta. (Arief, 2020).

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kerajinan batik juga sangat membantu dalam perekonomian Indonesia hingga saat ini. Salah satu daerah di Indonesia yang menjalankan industri kreatif kerajinan batik yakni Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Pulau Ngenang Kota Batam. Kota Batam yang terletak pada provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tahun 2020 Kota Batam memiliki 12 kecamatan dan 64 kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau) (Wikiwand, 2020). Dari 70 kecamatan dan 141 kelurahan yang terdapat di kota Batam, salah satunya yaitu kecamatan Nongsa yang didalamnya terdapat beberapa kelurahan, salah satunya yaitu kelurahan Ngenang. Kelurahan Ngenang sendiri merupakan salah satu daerah kawasan industri kreatif, daerah ini dirancang menjadi tempat

pariwisata berbasis alam. Dilansir dari Antara, Pulau Ngenang memiliki potensi besar sebagai daerah tujuan pariwisata, karena daerahnya masih alami dengan masyarakat yang guyub. Meski dekat dari pusat kota, namun Pulau Ngenang masih relatif alami sehingga menarik bagi pelancong. Marlin Agustina Rudi selaku Dewan Kerajinan Nasional Daerah kota Batam mengatakan Selain mengembangkan pariwisata, kata dia, Pulau Ngenang juga dikembangkan sebagai pusat tenun dan batik di Batam (Cahaya, 2021).

Sesuai dengan ujaran Dewan kerajinan Nasional Daerah kota Batam, Marlin Agustina Rudi, ia menyebutkan Pulau Ngenang Ini akan kami jadikan contoh kampung wisata di Batam. Tolong promosikan kami. Karena ini dari tidak ada sampai seperti ini perjuangannya luar biasa. Selain batik, Pulau Ngenang juga terdapat kerajinan tenun. Hasil tenun Ngenang ini juga sudah ada yang dibawa ke Jerman, Australia. Pesanan dari Singapura juga sudah masuk, tapi karena covid belum bisa datang orangnya. Selain itu, di sini juga ada IKM Batik Ngenang Mandiri. Saat ini IKM Batik Ngenang Mandiri sudah mendapat pesanan untuk seragam sekolah (Mediacenter, 13 Januari 2020).

Dengan melihat potensi pada industri kreatif di kelurahan Ngenang dalam rangka pengembangan ekonomi lokal maka dalam melaksanakan layanan publik, tidak hanya mengandalkan layanan sektor pemerintahan saja, namun sudah merambah pada sektor swasta. Sektor swasta menjadi perhatian pemerintah mengingat kontribusinya semakin nyata dalam mendukung pembangunan. Kerjasama dengan melibatkan aktor lain diluar pemerintah atau dalam tataran konsep disebut sebagai *collaborative governance*. *Collabotaive Governance*

merupakan cara lain dalam menjalankan kewenangan pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan *Collaborative Governance* maka pemerintah telah melibatkan sektor swasta. Terdapat prinsip dasar dalam menerapkan konsep *Collaborative Governance* diantaranya pelibatan aktor lain diluar pemerintah atau negara, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, serta bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash 2007 dalam Angini, Muhammad, & Kurnianingsih, 2019:79).

Pada pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif di Pulau Ngenag Kota Batam sendiri *collaborative governance* dilakukan oleh 3 aktor, yakni dari pihak pemerintahan Dewan Kerajinan Nasional Daerah dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, dari pihak swasta yakni Bank Mandiri, serta juga melibatkan masyarakat Pulau Ngenang. Selain itu, Universitas Internasional Batam juga berkolaborasi dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif tersebut, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MoU pada 21 Oktober 2019 di Universitas Internasional Batam tepatnya di aula gedung B lantai 1.

Dalam beberapa tahun terakhir *collaborative governance* menjadi salah satu konsep pemerintahan yang banyak diminati oleh para pemangku kepentingan dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas dan kepentingan negara, *collaborative governance* muncul untuk merespon terjadinya kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik Ansell dan Gash 2007 dalam Angini et

al. (2019:79). Adanya kerjasama antar stakeholder maka banyaknya potensi di sektor industri batik yang dimiliki Kota Batam mampu menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Mengacu pada pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno yang menyatakan bahwa batik buatan Batam patut menjadi produk unggulan daerah dan layak untuk di ekspor, batik yang nyaman dipakai dan perlu dikemas secara menarik. Pernyataan tersebut diutarakannya ketika beliau melakukan kunjungan ke Dewan Kerajinan Nasional Daerah Batam pada awal Januari 2021 lalu. Terkait pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut, terlihat bahwasanya Batik Batam mempunyai keunggulan dan harapan untuk bias dijadikan produk unggulan daerah yang nantinya dapat di ekspor dan membawa nama Batam ke kancah Internasional.

Dengan berbagai motif khas daerah yang tentunya mempunyai arti tersendiri dari setiap motifnya. Hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan produk ini dapat menarik perhatian pembeli nantinya. Dengan didukung oleh kolaborasi yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi lokal di Pulau Ngenang ini diharapkan dapat mengembangkan ekonomi lokal yang ada di Pulau Ngenang tersebut. Seperti yang telah disebutkan, batik menjadi salah satu ekonomi lokal yang terdapat di Pulau Ngenang. Ibu Marlin Agustina Rudi selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Batam juga sebagai pelopor IKM Batik Ngenang Mandiri yang sudah memperkenalkan batik Batam ke mancanegara ini juga mengatakan kami harap

Kemenparekraf bisa terus mendukung kami. Karena salah satu kendala kami adalah keterbatasan pendanaan dan promosi (Kompas, 2021). Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa IKM batik Ngenang mandiri ini masih butuh banyak support dari khalayak ramai guna kemajuan produk yang diperjual belikan serta keberadaannya dapat diketahui oleh orang banyak, perlu dukungan dari berbagai pihak yang dapat membantu mengembangkan IKM batik Ngenang mandiri tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Industri Kreatif Oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Studi Kasus Pada Kerajinan Batik di Pulau Ngenang Kota Batam)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Industri Kreatif di pulau Ngenang Kota Batam?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan *Collaborative Governance* dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif di pulau Ngenang Kota Batam

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dari *collaborative governance*. dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif di pulau Ngenang Kota Batam

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan pada penelitian dan dapat dipecahkan dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat maka ada manfaat secara teoritis dan praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan dan memperkaya Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai masalah *collaborative governance* dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif di pulau Ngenang kota Batam
- b. Penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kota Batam dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif khususnya untuk pengembangan pada kerajinan Batik

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam terhadap suatu penelitian yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif dengan menggunakan konsep *collaborative governance*



- b. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan masyarakat sekitar terhadap pengembangan ekonomi mereka yang berbasis industri kreatif khususnya mengenai keterampilan atau kerajinan terhadap Batik untuk turut serta dalam menjaga dan mengembangkan Kerajinan Batik itu sendiri.

